

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

TEMA : Ekosistem *Civic Tech* dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia

Pemateri :

1. **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute.
2. **Viryan Aziz**, Komisioner KPU RI.
3. **Arthur Glenn Maail**, Manajer Riset Open Data Labs, Jakarta.
4. **Mardani Ali Sera**, Anggota Komisi III DPR RI.
5. **Maharddhika**, Peneliti Perludem.

Moderator : **Arfianto Purbolaksono**, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Viryan Aziz, Komisioner KPU RI.

- Ekosistem *civic tech* menjadi kata kunci untuk masyarakat sipil di Indonesia untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan dapat berkontribusi dalam digitalisasi penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan penggunaan gawai dan internet oleh masyarakat yang memperlihatkan bahwa masyarakat sudah siap untuk menerima digitalisasi pemilu.
- Terdapat tiga tahap yang menjadi roadmap transparansi informasi KPU, yaitu penerapan terhadap peraturan hukum tentang keterbukaan informasi publik, prinsip, dan standar; digitalisasi pemilu; serta implementasi data pemilu terbuka.
- Pada konteks digitalisasi pemilu, hal yang harus diperhatikan adalah kedaulatan digital. Sehingga apapun yang kita gunakan dalam pengelolaan data dapat diberdayakan secara efektif. Kemudian juga harus mampu untuk memenuhi prinsip digitalisasi pemilu seperti akuntabilitas, aksesibilitas, kecepatan, kemurnian, kemudahan, transparansi, dan partisipasi. Hal tersebut harus diterapkan dalam proses, data pemilu terbuka, serta dalam hasil dari penyelenggaraan pemilu.
- Hal yang harus diperhatikan adalah akar masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Dapat dilihat dari tiga dasar hukum penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Dengan memperhatikan waktu pengesahan dasar hukum dapat dilihat bahwa tidak terdapat disain hukum pemilu berkelanjutan.
- Harus terpenuhinya prinsip pengembangan digitalisasi Pemilu yang terdiri dari meningkatkan derajat pemilu demokratis, semua tahapan penyelenggaraan pemilu kecuali dalam penghitungan suara, memudahkan para pihak, memberikan jaminan keamanan digital, dan mampu untuk menyediakan dan memberikan data pemilu secara terbuka.
- KPU telah mencoba untuk merampungkan data dan persiapan dalam digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, diantaranya berisikan daftar semua dataset yang dapat dilakukan pencarian berdasarkan topik, tag, atau tanggal. Kemudian dataset dapat diunduh dengan memilih *icon file* di sebelah kanan masing-masing dataset. Data seluruh tahapan pemilu akan diupload berdasarkan topik yang ada dalam format csv dan/atau excel.

- Sejak tahun 2018 KPU telah menyadari tentang pentingnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Termasuk dengan mempelajari RUU PDP agar dapat memaksimalkan perlindungan data pribadi masyarakat terkait dengan keterbukaan data kepiluan.
- Integrasi data pemilu belum dapat dirampungkan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Tapi telah terdapat beberapa tahapan persiapan untuk dapat mengintegrasikan data pemilu yang dibutuhkan oleh publik pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute.

- Adanya *civic tech* merupakan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar, keterlibatan dalam pemerintahan, atau membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan publik. Akan tetapi masih terdapat beberapa bentuk ancaman bagi *civic tech*, diantaranya adalah hoaks, kerahasiaan dan keamanan data, ketimpangan teknologi, dan ancaman dari UU ITE.
- Pada saat ini RUU PDP masih dalam pembahasan di DPR RI, akan tetapi masih terdapat persoalan berupa pasal karet dalam beberapa undang-undang seperti UU ITE masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar regulasi hukum digital tidak menjadi alat untuk melakukan pemidanaan terhadap aktivitas yang dilakukan di ruang digital.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membantu dalam merencanakan strategi mempromosikan inisiatif *civic tech* yang akan mendorong keterbukaan data pemilu, seperti penggunaan API; memberikan rekomendasi mengenai strategi pengembangan program di atas melalui pemetaan partner, teknologi yang relevan dan cara-cara terbaik dalam penggunaan data pemilu; serta mengkaji kumpulan data pemilu yang tersedia di Indonesia dan mendorong pemanfaatan data tersebut.
- Penelitian ini menggunakan pendekatan *system thinking* yang akan melibatkan tiga variabel yang melibatkan berbagai orang dan kelompok terkait serta memadukan delapan elemen program *civic tech*, sembilan prinsip data pemilu terbuka, dan enam belas tipe data pemilu terbuka.
- Indonesia sebenarnya telah memiliki komitmen terhadap ekosistem *civic tech* terkait data pemilu terbuka, tidak hanya itu, usaha yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan data agar mudah diakses oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat tantangan berupa komitmen politik mengenai data pemilu, keterbatasan anggaran, ketidaksamaan visi dan komitmen dari *stakeholder* terkait data pemilu terbuka, penolakan dari kandidat pemilu untuk membuka profil mereka seperti kerahasiaan data, dan interpretasi beragam mengenai peraturan pemilu
- Terdapat beberapa kelompok di luar pemerintahan seperti KPU yang harus dilibatkan terkait dengan penyelenggaraan data pemilu terbuka. Diantaranya adalah pelibatan kelompok masyarakat sipil serta komunitas-komunitas yang berkegiatan di bidang teknologi informasi.
- Terdapat beberapa bentuk keterlibatan dan kapasitas kelompok masyarakat, diantaranya adalah akses data dan transparansi seperti yang dilakukan dalam Kawal Pemilu dan Rumah Pemilu. Kemudian kami juga memperhatikan bahwa penting untuk melibatkan komunitas IT untuk dapat berpartisipasi dan berkolaborasi dalam persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu berikutnya.
- Dukungan anggaran merupakan salah satu hal yang cukup baik dalam ekosistem *civic tech* terkait data pemilu terbuka. Selain itu dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu dapat berasal swasta maupun lembaga donor tetapi perlu ada mekanisme perjanjian yang jelas meminimalisir risiko pelanggaran etik.
- Terdapat keberagaman dalam hal permintaan data publik seperti pendidikan pemilih, pengawasan pemilu, serta tujuan akademik lainnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa catatan untuk hal tersebut seperti memastikan data pemilu tersedia dengan baik, seperti data kandidat pemilu yang biasanya sulit diperoleh, serta integrasi data yang menampilkan data incumbent dan kandidat baru, baik latar belakang maupun karirnya secara historis.

- Dua tantangan harus segera diantisipasi oleh penyelenggara pemilu yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi dan keterampilan SDM. Peningkatan kapasitas dari SDM, terutama penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah. Caranya dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan NGO dan komunitas Civic Tech, membangun jejaring untuk berbagai standar dan praktik baik mengenai pengelolaan data pemilu terbuka, dan forum relevan lainnya untuk berbagi pengalaman dan keahlian.

Maharddhika, Peneliti Perludem.

- Penelitian yang dilakukan oleh Perludem bersama dengan The Indonesian Institute merupakan langkah awal untuk melihat gambaran bagaimana ekosistem *civic tech* dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi kompas untuk menjadi penunjuk arah kemana digitalisasi pemilu di Indonesia akan diarahkan.
- Dilakukan pendekatan ekosistem untuk memetakan persoalan terkait dengan program keberlanjutan keterbukaan data pemilu. Hal tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komitmen politik, kerangka hukum, kemampuan kelempagaan, ketersediaan data, permohonan data, dukungan anggaran, keterlibatan publik, hingga yang paling mendasar dan masih dianggap perlu banyak pengembangan adalah ketersediaan infrastruktur teknologi.
- Terdapat empat poin untuk dapat mendorong pengembangan ekosistem keterbukaan data pemilu yaitu memastikan kesinambungan visi keterbukaan pemilu, kokreasi implementasi komitmen rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia mengenai pemilu, membangun ekosistem satu data pemilu, serta menguatkan sinergi penyelenggara pemilu, organisasi kepemiluan, dan komunitas teknologi.
- Berdasarkan pengembangan ekosistem tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa beberapa persoalan terkait dengan kebijakan *civic tech* dalam penyelenggaraan pemilu dapat diatasi. Salah satu contoh persoalan yang menjadi catatan adalah dapat berubahnya kebijakan terkait dengan keterbukaan data pemilu yang dapat berubah pasca bergantinya kepemimpinan di KPU. Maka hal yang harus diperhatikan adalah memastikan kesinambungan visi dan komitmen untuk mengembangkan digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
- Salah satu faktor yang akan menjadi tujuan dari rencana aksi ini adalah tentang SiRekap yang mampu menyajikan data kepada publik menjadi hal yang harus diperhatikan. Agar publik mampu berpartisipasi untuk memantau proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilu.
- Kemudian tentang data yang harus dibuka atau data yang harus ditutup harus mampu dipilah dengan baik. Jadi tidak hanya memperlihatkan data rekapitulasi kepada publik, namun juga membuka data-data lain seperti jumlah pemilih hingga apa gawai yang digunakan untuk mengakses rekapitulasi. Hal tersebut dibutuhkan agar penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan lebih terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Arthur Glenn Maail, Manajer Riset Open Data Labs, Jakarta.

- Open data labs belum banyak bekerja dengan data-data pemilu, namun hal yang akan saya sampaikan ini terkait dengan *civic tech* secara umum. Secara umum, *civic tech* memang hadir untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Masyarakat dapat dikategorikan dari bentuk pelibatannya dari yang paling pasif dimana masyarakat hanya menerima informasi dari satu arah, hingga pelibatan masyarakat secara independen.
- Teknologi informasi memfasilitasi untuk dilakukannya interaksi yang berulang dan lebih sering antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat dilakukan lebih maksimal maka akses informasi menjadi hal yang harus mampu dipenuhi oleh pemerintah agar mampu untuk meningkatkan angka pelibatan masyarakat.

- Perkembangan teknologi informasi seperti munculnya sumber data baru yang juga dikenal dengan *big data*, maka diperlukan pembaharuan dalam beberapa hal seperti akses data, transparansi data terbuka, serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam mengumpulkan data serta memberikan masukan terkait dengan data tersebut kepada pemerintah atau pengambil kebijakan.
- Di Indonesia, *open data* muncul pada tahun 2012 atau 2013 dan pada saat itu kita telah memiliki undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Indonesia juga terlibat secara aktif dalam forum-forum dan berkomitmen dalam implementasi program *open government*. Mulai saat itu muncul beberapa gelombang baru dan memunculkan evolusi terhadap gerakan yang mendorong keterbukaan data seluas-luasnya. Dilanjutkan dengan pelibatan masyarakat secara aktif hingga memberikan perlindungan terhadap data-data pribadi masyarakat.
- Kemudian, perkembangan keterbukaan data di Indonesia menggunakan open data barometer yang kami juga terlibat di dalamnya. Status Indonesia saat ini skornya adalah 37 dari skala 100 dan open data barometer ini berdasarkan pada tiga faktor yaitu aspek kesiapan, ketersediaan regulasi, dan efek atau dampak yang ditimbulkan. Kedepannya yang dapat ditingkatkan adalah pelibatan masyarakat sipil yang berada di daerah, karena selama ini kelompok yang dilibatkan lebih banyak dari Jakarta.
- Saat ini terkait keterbukaan data lebih banyak membahas tentang isu politik. Masih sangat minim keterbukaan data terkait dengan isu-isu lain seperti terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian kali ini.
- Kami dari Open Data Labs juga mendorong agar sumber data terbuka tidak hanya berasal dari pemerintah, namun masyarakat sipil juga dapat memproduksi data yang dapat diintegrasikan dengan data-data resmi dari pemerintah. Hal tersebut juga harus diiringi dengan mempersiapkan regulasi hukum untuk mengatur standar data yang dapat dipublikasikan hingga diakses oleh masyarakat.

Mardani Ali Sera, Anggota Komisi III DPR RI.

- Kita saat ini sedang berkejaran dengan menjaga integritas pemilu serta bersabar dengan keadaan penyelenggaraan pemilu seperti masalah anggaran masih belum dapat dilakukan secara maksimal.
- Terkait dengan sistem, DPR di awalnya menyatukan pilpres dan pileg dalam UU Pemilu dan kemudian satu lagi ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan berada dalam UU Pilkada. Hal yang disayangkan adalah dihentikannya pembahasan terhadap UU Pemilu sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Padahal, banyak ide besar yang ingin dibuat dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu.
- Kedepannya hal yang diperlukan adalah melakukan penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana. Seringkali kawan-kawan KPU dituduh lepas tangan atas inisiatif yang disampaikannya, padahal sebenarnya KPU pun memiliki keterbatasan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.
- Seringkali ketika membahas persolan kepilluan kita akan terjebak dengan dua klasifikasi, antara berpikir sebagai seorang politisi atau menjadi seorang negarawan. Hal tersebut dapat dilihat ketika membahas dan membicarakan beberapa isu krusial seperti dalam membahas tentang *threshold*. Apakah yang dipertimbangkan adalah kepentingan pragmatis politisi atau berpikir secara ideal dan rasional sebagai seorang negarawan.

FORUM DISKUSI

- 1. Wandi Ismail - KPU Kota Palopo**
untuk semua narasumber

Apa problem paling krusial dalam ekosistem *civic tech* dalam kaitannya dengan keterbukaan data pemilu untuk mencapai tingkat integritas pemilu (terutama jelang pemilu 2024) yang semakin baik dan bagaimana menyikapinya?

Tanggapan

1. Viryan Aziz menjawab Wandu Ismail

Secara kontekstual komitmen KPU tetap sama, hal tersebut dapat dilihat dari open data KPU yang akan dapat diakses dan digunakan dalam waktu dekat oleh masyarakat. Kemudian dibutuhkan kerangka hukum yang mampu meningkatkan ekosistem *civic tech* dan dapat dilakukan secara bersama-sama dari seluruh pihak terkait.

2. Adinda Tenriangke Muchtar menjawab Wandu Ismail

Terdapat hal teknis seperti ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan masih minimnya kapasitas SDM yang mengelola sistem keterbukaan data tersebut. Kemudian juga dari segi normatif tentang ketersediaan peraturan perundang-undangan yang lebih mendetail dengan membunyikan agar keterbukaan data tersebut dilakukan secara transparan kepada publik.

3. Maharddhika menjawab Wandu Ismail

Hal yang perlu diprioritaskan dalam mengembangkan ekosistem *civic tech* adalah membangun infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas dari SDM yang mengelola data tersebut.

4. Arthur Glenn Maail menjawab Wandu Ismail

Dari alur manajemen data dari pengumpulan hingga publikasi mungkin memang sudah ada, tapi yang harus diperhatikan kedepannya adalah melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengumpulan data. Untuk memformalkan mekanisme ini maka dibutuhkan sebuah kerangka hukum terkait dengan partisipasi kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta dalam pelibatan masyarakat dalam mengumpulkan hingga mempublikasikan data-data tersebut.

5. Mardani Ali Sera menjawab Wandu Ismail

Ada dua metode yaitu mendorong dan menarik dalam proses pembentukan sebuah kebijakan. Masyarakat sipil merupakan kelompok yang mendorong pembentukan sebuah kebijakan. Maka dibutuhkan kolaborasi bersama untuk membentuk dan mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Dukungan harus berasal dari seluruh pihak, termasuk dukungan berupa anggaran.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~